



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10365-10371

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Hayu Pertiwi, Maria Imaculata Yenni, Andin Rusmini
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang
hayupertiwi97@gmail.com, dipsylalapo112@gmail.com

Abstrak

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, serta lemahnya tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian, temuan utama, serta permasalahan desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian dilakukan dengan menelaah sepuluh artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2020–2025 dan dinilai relevan dengan topik desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual desentralisasi fiskal memiliki peran strategis dalam mendukung otonomi daerah dan prinsip money follows function. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan desentralisasi fiskal yang menekankan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, peningkatan akuntabilitas dan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Systematic Literature Review.

1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi ketatanegaraan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan. Otonomi daerah dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kebijakan ini, diharapkan pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat, pengambilan keputusan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, serta pemerataan pembangunan antar daerah dapat tercapai secara lebih optimal (1). Dalam praktik ketatanegaraan, otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari aspek keuangan daerah. Kewenangan yang luas tanpa dukungan fiskal yang memadai berpotensi menjadikan otonomi daerah bersifat semu. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Aspek keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga mencerminkan tingkat kemandirian, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah (2).

Desentralisasi fiskal hadir sebagai instrumen utama untuk menopang pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat mendistribusikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, baik melalui pemberian kewenangan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melalui mekanisme transfer fiskal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta berbagai bentuk dana transfer lainnya. Secara konseptual, desentralisasi fiskal didasarkan pada prinsip money follows function, yang menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan pemerintahan harus diikuti dengan dukungan pendanaan yang memadai (3). Secara normatif, desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk

meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta mendorong pemerintah daerah agar lebih inovatif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, serta budaya daerah masing-masing (4).

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Salah satu permasalahan utama yang banyak disoroti dalam berbagai kajian adalah tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun transfer fiskal telah meningkatkan kapasitas anggaran daerah, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah di sebagian besar daerah, terutama di daerah dengan basis ekonomi yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah juga menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, basis ekonomi kuat, serta infrastruktur yang memadai cenderung mampu memanfaatkan desentralisasi fiskal secara lebih optimal. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah justru menghadapi kesulitan dalam membiayai pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi fiskal yang adil dan efektif.

Dari perspektif tata kelola, desentralisasi fiskal juga menghadapi tantangan berupa lemahnya akuntabilitas dan pengawasan keuangan daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja yang bersifat produktif dan berorientasi pada pelayanan publik relatif terbatas. Selain itu, lemahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah serta sistem pengawasan yang belum optimal berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk praktik korupsi di tingkat lokal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan otonomi daerah dari berbagai perspektif, seperti hukum, ekonomi, dan administrasi publik. Studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat demokrasi lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai dan sistem pengawasan yang efektif. Dalam perspektif hukum tata negara, desentralisasi fiskal dipandang sebagai bagian integral dari pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memerlukan kepastian hukum dan konsistensi regulasi. Di sisi lain, sejumlah penelitian juga menyoroti dampak negatif desentralisasi fiskal apabila tidak dirancang dan diimplementasikan secara hati-hati. Desentralisasi fiskal dapat memunculkan permasalahan baru, seperti ketimpangan fiskal antar daerah, rendahnya kualitas belanja daerah, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan kewenangan di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen kebijakan yang keberhasilannya sangat bergantung pada desain regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Meskipun kajian mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tergolong cukup banyak, literatur yang ada masih bersifat parsial dan tersebar, dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Sebagian kajian lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan fiskal, sementara kajian lain menekankan dimensi hukum dan kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan belum tersedianya gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian, kecenderungan temuan, serta posisi desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah dalam kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia secara utuh dan terintegrasi.

Selain itu, dinamika kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan pembaruan regulasi dan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan tersebut menuntut adanya kajian yang mampu menangkap perkembangan terbaru serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan sesuai dengan tujuan awal otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan penelitian yang sistematis dan terstruktur untuk mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu dan mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif literatur terkait desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan penelusuran, seleksi, dan analisis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan kajian, tema-tema utama, serta temuan kunci yang muncul dalam literatur.

Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memetakan kecenderungan penelitian desentralisasi fiskal, mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasinya, serta menelaah aspek hukum dan kebijakan yang memerlukan penguatan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan. Sejalan dengan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan dan kecenderungan kajian desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia, apa saja temuan utama dan permasalahan yang diidentifikasi dalam literatur terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal, serta aspek-aspek apa yang masih memerlukan kajian lebih lanjut dalam konteks hukum dan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif, objektif, dan sistematis terhadap perkembangan kajian ilmiah, temuan utama, serta permasalahan yang muncul dalam implementasi desentralisasi fiskal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur secara terstruktur sehingga hasil kajian yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan tinjauan literatur konvensional (5). Tahapan penelitian dimulai dengan perumusan fokus kajian dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan peran, efektivitas, serta permasalahan desentralisasi fiskal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah nasional, yaitu Google Scholar dan Garuda, yang dipilih karena memiliki cakupan publikasi ilmiah nasional yang luas dan relevan dengan konteks kebijakan publik dan hukum di Indonesia. Proses penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain desentralisasi fiskal, otonomi daerah, keuangan daerah, dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (6). Tahap berikutnya adalah seleksi literatur dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang membahas desentralisasi fiskal dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, dipublikasikan dalam rentang waktu 2020–2025, tersedia dalam teks penuh, memiliki metodologi penelitian yang jelas, serta diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang memiliki kredibilitas akademik. Sementara itu, artikel yang bersifat opini, tidak relevan dengan fokus penelitian, atau tidak memenuhi kriteria metodologis dikecualikan dari analisis. Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh sepuluh artikel ilmiah yang dinilai paling relevan dan representatif untuk dianalisis.

Literatur terpilih kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama, seperti kemandirian fiskal daerah, ketergantungan terhadap transfer fiskal pusat, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta celah penelitian yang masih ada. Melalui tahapan tersebut, metode SLR dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai peran serta tantangan desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kajian desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia, penelitian ini menyajikan ringkasan literatur yang dianalisis melalui metode *Systematic Literature Review*. Tabel berikut memuat artikel-artikel terpilih yang menjadi objek kajian, meliputi judul artikel, penulis, tahun publikasi, serta temuan utama yang relevan dengan fokus penelitian.

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Temuan Utama
1	<i>Desentralisasi Fiskal dan Politik dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia</i>	Desi Syahrani, dkk.	2024	Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun dalam praktiknya masih menunjukkan ketergantungan tinggi daerah terhadap transfer pusat serta kecenderungan peningkatan belanja pegawai yang melemahkan kemandirian fiskal daerah (7).

2	<i>Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus Jawa Tengah)</i>	Vebrina Hania Cholily	2023	Desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu mendukung kemandirian daerah karena rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lemahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah (8).
3	<i>Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia</i>	Womsiter Sinaga	2023	Desentralisasi fiskal telah memperluas sumber pembiayaan daerah, namun belum berdampak signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan akibat rendahnya kualitas belanja daerah dan lemahnya tata kelola keuangan daerah (9).
4	<i>Reorientasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Upaya Meneguhkan Tujuan Bernegara</i>	Cakra Arbas	2025	Desentralisasi fiskal merupakan instrumen konstitusional untuk menopang otonomi daerah, namun memerlukan reorientasi kebijakan agar lebih adil, efisien, dan selaras dengan kemampuan keuangan negara serta tujuan bernegara (10).
5	<i>Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara</i>	Halimatus Sakdiyah	2025	Ketimpangan fiskal dan lemahnya kapasitas kelembagaan daerah menghambat efektivitas otonomi daerah, sehingga desentralisasi fiskal belum optimal sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan (11).
6	<i>Dinamika dan Ketimpangan Pembangunan dalam Pelaksanaan Asas Desentralisasi</i>	Atikah Ramadhani, dkk.	2025	Desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga berisiko memperlebar ketimpangan antar daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah (12).
7	<i>Akuntabilitas dalam Desentralisasi Fiskal: Tantangan dan Strategi</i>	Retno Ridhawati	2025	Keberhasilan desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah sangat bergantung pada akuntabilitas, kapasitas administrasi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah (13).
8	<i>Desentralisasi yang Berliku: Dinamika dan Masa Depan Otonomi Daerah</i>	Lanang Maulana, dkk.	2025	Desentralisasi fiskal mendukung otonomi daerah, namun masih menghadapi persoalan klasik berupa ketergantungan fiskal, korupsi lokal, dan ketimpangan kapasitas antardaerah (14).
9	<i>Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah</i>	Lusia L. Halawa, dkk.	2025	Transfer fiskal (DAU dan DAK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi ketergantungan pada dana pusat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menciptakan kemandirian daerah (15).
10	<i>Melacak Desentralisasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia</i>	Aris Purnomo & Myaskur	2024	Secara normatif, desentralisasi fiskal merupakan bagian integral dari otonomi daerah, namun implementasinya masih dibatasi oleh intervensi pusat dan ketimpangan kapasitas fiskal daerah (16).

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap artikel-artikel ilmiah yang mengkaji desentralisasi fiskal dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, ditemukan bahwa desentralisasi fiskal secara konseptual diposisikan sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Mayoritas literatur menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Syahrani et al., 2024; Arbas, 2025). Dalam perspektif teoritis, desentralisasi fiskal diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya.

Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang cukup kompleks. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa meskipun mekanisme transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil telah meningkatkan kapasitas anggaran daerah secara nominal, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi (Cholily, 2023; Sinaga, 2023; Halawa et al., 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menjadi indikator utama lemahnya kemandirian fiskal tersebut, terutama di daerah-daerah dengan basis ekonomi yang terbatas.

Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada rendahnya kemandirian keuangan daerah, tetapi juga berpotensi melemahkan daya inovasi pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Beberapa studi menunjukkan bahwa daerah cenderung bersikap pasif dan lebih berorientasi pada optimalisasi penerimaan transfer dibandingkan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara berkelanjutan (Cholily, 2023; Syahrani et al., 2024). Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menimbulkan ketergantungan struktural yang menghambat terwujudnya esensi otonomi daerah sebagai kemandirian dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Selain persoalan ketergantungan fiskal, literatur juga mengungkapkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Daerah dengan basis ekonomi yang kuat, sumber daya alam melimpah, serta kapasitas administrasi yang memadai cenderung mampu memanfaatkan desentralisasi fiskal secara lebih optimal. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah justru mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan dan menyediakan pelayanan publik yang memadai (Ramadhani et al., 2025; Maulana et al., 2026). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan antar wilayah, bahkan dalam beberapa kasus justru berpotensi memperlebar disparitas fiskal dan ekonomi antar daerah.

Temuan literatur juga menegaskan bahwa secara normatif desentralisasi fiskal memiliki posisi strategis sebagai instrumen pendukung otonomi daerah, sejalan dengan prinsip *money follows function* yang menekankan bahwa pelimpahan kewenangan pemerintahan harus diikuti dengan dukungan pendanaan yang memadai (Sinaga, 2023; Arbas, 2025). Prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, efektivitas normatif dari pengaturan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Sebagian besar penelitian yang dikaji menyoroti bahwa desain desentralisasi fiskal di Indonesia masih cenderung menempatkan pemerintah daerah dalam posisi subordinatif terhadap pemerintah pusat. Dominasi transfer fiskal yang bersifat *top-down*, tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, berpotensi melemahkan esensi otonomi daerah itu sendiri (Syahrani et al., 2024; Cholily, 2023). Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mengelola sumber daya lokal, mengembangkan basis pajak daerah, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, literatur juga menunjukkan bahwa persoalan tata kelola keuangan daerah merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal. Rendahnya akuntabilitas, lemahnya sistem pengawasan, serta dominasi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi persoalan yang berulang kali disoroti dalam berbagai penelitian (Ridhawati, 2025; Sakdiyah, 2025). Struktur

belanja daerah yang tidak proporsional tersebut mengurangi ruang fiskal bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik yang produktif, sehingga manfaat desentralisasi fiskal bagi kesejahteraan masyarakat menjadi kurang optimal.

Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa tanpa penguatan akuntabilitas dan transparansi, desentralisasi fiskal justru berisiko memperbesar peluang penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi di tingkat lokal (Maulana et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan integritas aparatur penyelenggara pemerintahan.

Di sisi lain, hasil kajian literatur juga memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal tetap memiliki potensi positif dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah apabila disertai dengan kebijakan afirmatif dan penguatan kapasitas daerah. Penguatan kualitas belanja daerah yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta reformulasi mekanisme transfer fiskal yang lebih berbasis kinerja dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan desentralisasi fiskal berfungsi secara optimal (Ramadhani et al., 2025; Halawa et al., 2025). Dengan pendekatan tersebut, desentralisasi fiskal tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun di sisi lain, berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan tata kelola menyebabkan tujuan kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai (Sinaga, 2023; Arbas, 2025). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan desentralisasi fiskal yang tidak hanya menekankan pada besaran transfer fiskal, tetapi juga pada penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta penciptaan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Selain itu, kajian lebih lanjut masih diperlukan dalam konteks hukum dan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya terkait harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta desain kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review*, desentralisasi fiskal secara normatif dan konseptual merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat kapasitas keuangan daerah, serta mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah masih menjadi permasalahan utama. Selain itu, lemahnya tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah turut menghambat optimalisasi desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah. Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tetap memiliki potensi besar untuk mendukung otonomi daerah apabila disertai dengan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta kebijakan transfer fiskal yang lebih adil dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan desentralisasi fiskal agar lebih efektif dalam mewujudkan kemandirian dan pemerataan pembangunan daerah di Indonesia.

Referensi

1. Aristawati KN, Fahmi MT, Fadeli MR, Wardani NK. ASPEK HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Humani* [Internet]. 2024 Jun 28 [cited 2025 Dec 26];1(1). Available from: <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/6>
2. Meinarsari AA, Nursadi H. ARAH BARU HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH: SENTRALISASI ATAU DESENTRALISASI. *J Syntax Lit* [Internet]. 2022 Aug 1 [cited 2025 Dec 26];7(8):10508. Available from: <https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:158575995?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:158575995>
3. Christia & Ispriyarso. Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu J Penelit dan Kaji Ilm*. 2019;15(1):149.
4. Hasanuddin S, Penelitian A, Kunci K, Publik P, Daerah P. Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah: J Kolaboratif Sains [Internet]. 2025 Sep 16 [cited 2025 Dec 26];8(9):5762–73. Available from: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8564>
5. Judijanto L, Wibowo G, Karimuddin K, Samsuddin H. Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif [Internet]. Jambi:

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Sonpedia Publishing Indonesia; 2024 [cited 2025 Nov 11]. Available from: https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dvYkEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pendekatan+ini+memungkinkan+peneliti+menggambarkan+fenomena+komunikasi+yang+terjadi+secara+nyata+tanpa+melakukan+intervensi+terhadap+variabel+penelitian.&ots=rgNQI_rYmQ&sig=5HUb66UH
6. Sena Kurniawan. LITERASI DIGITAL UNTUK ABAD KE-21 [Internet]. Rahma AZM, editor. Jawa Timur: Pustaka Aksara; 2025 [cited 2025 Dec 17]. Available from: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tEVzEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Berdasarkan+fokus+tersebut,+dilakukan+pencarian+literatur+melalui+basis+data+ilmiah+nasional+dan+internasional,+seperti+Google+Scholar,+Garuda,+Sinta,+ScienceDirect,+IOP+Publishing,+dan+jurnal+terkait+lainnya.+Pencarian+literatur+dilakukan+menggunakan+kombinasi+kata+kunci+yang+relevan,+antara+lain+after-treatment+gas+buang,+catalytic+converter,+activated+carbon,+CO+emission+reduction,+HC+emission,+NOx+reduction,+dan+internal+combustion+engine.&ots=19gXHIvaqG&sig=eajKgfQVYM9ZiREZBvXITwPK6VA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 7. Syahrani D, Sitanggang DM, Nababan VR, Nasution AR. Desentralisasi Fiskal dan Politik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *JLEB J Law, Educ Bus.* 2024;2(1):210–5.
 8. Cholily VH. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) 2025 Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) Implementa. *J Penelit dan Pengabdian Masy.* 2023;2(2798–5210):2025–39.
 9. Womsiter Sinaga. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *J Darma Agung* [Internet]. 2023;31(1):203–19. Available from: http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
 10. Arbas C, Muhammadiyah U, Utara S. Reorientasi Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. *Grondwet.* 2025;4(2):84–109.
 11. Sakdiyah H. Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia. *JUPSI J Pendidik Sos Indones.* 2025;3(1):1–11.
 12. Ramadhani A, Laura P, Nicky T, Diangera A, Pratiwi RS, Erlangga F, et al. DINAMIKA DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI ANTAR DAERAH DI INDONESIA. *J Ilm Ekon Dan Manaj.* 2025;3(12):301–10.
 13. Ridhawati R. Akuntabilitas dalam Desentralisasi Fiskal: Tantangan dan Strategi untuk Tata Kelola Pemerintah Daerah. *J Sci Mandalika.* 2025;6:80–7.
 14. Maulana L, Al-farizi MR, Robbani MS, Mentari A. Desentralisasi yang Berliku : Menelusuri Dinamika , Ketimpangan , dan Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia. *J Ilm Penelit Mhs.* 2025;4(1):364–75.
 15. Lusia Lestina Halawa, Mira Sukma, Evlin Limbong, Wahjoe Pangestoeti. Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Stud Adm Publik dan Ilmu Komun.* 2025;2(1):43–53.
 16. Purnomo A, Myaskur. Melacak Desentralisasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia: Studi Uu Otonomi Daerah. *J Online Mhs Huk Tata Negara* [Internet]. 2023;1(2):61–70. Available from: <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-htn/article/view/1228>